

**TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM
EKSEKUTORIAL PERAMPASAN ASET DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Sivana Amanda Diamita Syndo

NIM. 05040720045



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sivana Amanda Diamita Syndo
NIM : 05040720045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Eksekutorial Perampasan Aset Di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Sivana Amanda Diamita Syndo
NIM. 05040720045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sivana Amanda Diamita Syndo

NIM : 05040720045

Judul : Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam
Eksekutorial Perampasan Aset Di Indonesia

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 April 2024

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

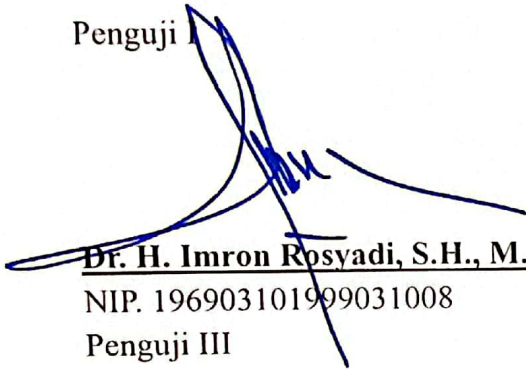
Nama : Sivana Amanda Diamita Syndo

NIM : 05040720045

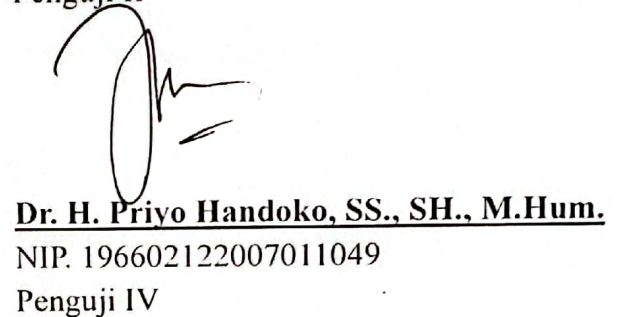
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

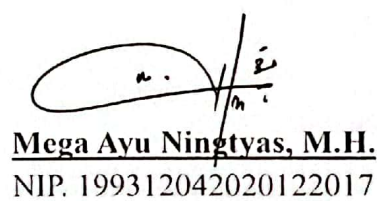
Penguji I


Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 19690310199031008
Penguji III

Penguji II


Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum.
NIP. 196602122007011049
Penguji IV


Marli Candra, LLb (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 04 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. Hj. Suqiyah Musri
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sivana Amanda Diamita Syndo

NIM : 05040720045

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail address : Sivanaamanda11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Eksekutorial Perampasan Aset Di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(
Sivana Amanda Diamita Syndo
)

ABSTRAK

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum, membawa pada implikasi bahwa korporasi harus turut mempertanggungjawabkan perbuatan termasuk tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini korupsi. Yang menjadi permasalahan adalah ketiadaan dasar hukum yang mengatur akan hal tersebut. Padahal pengakuan korporasi sebagai subjek hukum sudah cukup lama. Hal ini menjadikan kesulitan tersendiri dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap korporasi termasuk dalam penerapan sanksi perampasan aset. Keadaan tersebut menjadi urgensi latar belakang pembahasan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan *atau statute approach*, pendekatan konseptual atau *conseptual approach*, dan pendekatan sejarah atau *historical approach*. Penelitian ini berusaha untuk menjadikan undang-undang sebagai objek kajian. Selain itu, dalam bahasan penelitian ini juga berusaha melihat dari latar belakang dan perkembangan sejarah objek penelitian, sekaligus melakukan analisis terkait penerapan suatu konsep yang terlahir dari konsepsi teori hukum yang ada guna menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang selama ini ada di masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan 1) Penerapan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi sebagaimana semua tindak pidana yang terdapat dalam UU Tipikor dapat dikenakan atau diberlakukan pada korporasi meski dengan beberapa pembatasan seperti tidak semua jenis sanksi dapat dikenakan pada korporasi; 2) Eksekutorial perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang menjerat pelaku korporasi hingga saat ini belum diterapkan di Indonesia. Meski hukum acara yang diberlakukan untuk menjerat korporasi diatur dalam PERMA No.13 Tahun 2016, namun hal tersebut masih belum mengakomodir permasalahan terkait eksekutorial perampasan aset korporasi hingga saat ini.

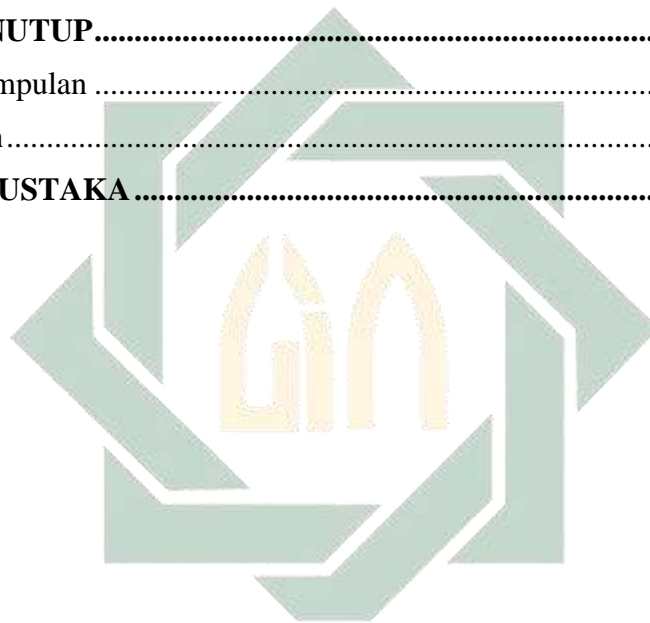
Atas dasar demikian dalam penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, antara lain: 1) Percepatan pengesahan RUU Perampasan aset; 2) Pembahasan lebih lanjut praktik beracara korporasi dalam RUU Perampasan aset maupun dalam KUHAP; 3) Pelaksanaan sosialisasi terpadu terkait mekanisme perampasan *in rem* pada penegak hukum dan masyarakat; 4) Adanya pengaturan mengenai alur koordinasi antar lembaga dalam menciptakan integrasi eksekutorial perampasan aset yang ideal oleh MA selaku lembaga yang berwenang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional	16
1. Tindak Pidana.....	16
2. Korupsi	17
3. Korporasi	18
4. Eksekutorial.....	19
5. Perampasan Aset di Indonesia.....	19
H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23

6. Teknik Penulisan	23
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DAN PERAMPASAN ASET DI INDONESIA	25
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	25
1. Definisi Umum Tindak Pidana Korupsi.....	25
2. Unsur Tindak Pidana Korupsi	29
3. Jenis dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	44
B. Konsep Tindak Pidana Korporasi.....	55
1. Sejarah Korporasi sebagai Subjek Hukum	55
2. Definisi Umum Tindak Pidana Korporasi	58
3. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi	61
4. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Positif Indonesia.....	65
5. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi.....	74
C. Tinjauan Umum Perampasan Aset	77
1. Definisi Perampasan Aset.....	77
2. Jenis Perampasan Aset	82
BAB III PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA	89
A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi	89
B. Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi di Indonesia	94
C. Kendala dan Hambatan Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.....	110
1. Kendala dan Hambatan pada Aspek Substansi Hukum	118
2. Kendala dan Hambatan pada Aspek Struktur Hukum	119
3. Kendala dan Hambatan pada Aspek Budaya Hukum	121
4. Kendala dan Hambatan pada Aspek Instrumental	122
5. Kendala dan Hambatan pada Aspek Manajemen.....	123
BAB IV EKSEKUTORIAL PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI.....	125
A. Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Oleh Korporasi	125
1. Perampasan Aset dalam Kacamata Hukum Progresif.....	125

2. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Konsepsi Penerapan Perampasan Aset	129
B. Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi...	134
1. Konsep Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	134
2. Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi di Indonesia	139
3. Kendala dan Hambatan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi di Indonesia.....	155
C. Model Perampasan Aset Peradilan Pidana Indonesia dalam Konsepsi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....	157
BAB V PENUTUP	169
A. Kesimpulan	169
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	172



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pemetaan kasus korupsi berdasar jenis korupsi tahun 2022.....	2
Grafik 2. Pengembalian keuangan negara hasil korupsi (2014-2018).....	8
Grafik 3. Tren penindakan tindak pidana korupsi dalam lima tahun terakhir (2018-2022).....	113
Grafik 4. Pemetaan penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum tahun 2022.....	129
Grafik 5. Potensi kerugian keuangan negara tahun 2018-2022	133
Grafik 6. Alur konsep perampasan aset dalam hukum progresif	125



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Unsur kerugian keuangan negara	49
Tabel 2. Unsur Suap Menyuap	49
Tabel 3. Unsur Pemerasan	51
Tabel 4. Pemetaan kasus korupsi berdasar jabatan tahun 2022	110
Tabel 5. Penanganan harta korporasi yang dilakukan penyitaan	154
Tabel 6. Konsep perampasan aset KUHP lama dan KUHP baru	134
Tabel 7. Konsep perampasan aset dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan dalam RUU Perampasan aset	135



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Rika Kurniasari. "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Litigasi* 24, no. 1 (2023): 72.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agustina, Shinta, Roni Saputra, Alex Argo Hernowo, and Ariehta Eleison Sembiring. *Penafiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Adriaan W. Bedner and Imam Nasima. Jakarta: LeIP, 2016.
- Agustine, Oly Viana. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (n.d.): 24.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 5, no. 3 (2021): 807.
- Alfarrizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)." *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 7.
- Ali, Mahrus. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 259.
- Alviolita, Fifink Praiseda. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 3.
- Amrullah, M. Arief. "Korporasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam." In *Simposium Nasional*, 21. Diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel: FH UNEJ, 2016. Accessed March 11, 2024. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80052/KORPORASI%20DAN%20EKSPLOITASI%20SDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Anandya, Dicky, and Lalola Easter. *Korupsi Lintas Trias Politika*. Laporan Hasil Pemantauan. Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2023. Accessed April

30, 2024.
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>.

Andika, Djohan. “Analisis Yuridis Potensi Asset Recovery Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021).” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Accessed April 30, 2024. http://repository.unissula.ac.id/26476/1/20302000158_fullpdf.pdf.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 154.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. 1st ed. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1996.

Arifin, Ridwan, Sigit Riyanto, and Akbar Kurnia Putra. “Collaborative Efforts in ASEAN for Global Asset Recovery Frameworks to Combat Corruption in the Digital Era.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 329–343.

Arifin, Ridwan, Cahya Wulandari, Muliadi Muliadi, Indah Sri Utari, and Tri Imam Munandar. “A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch’s Formula and Friedman’s Theory.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* VI, no. 2 (December 27, 2023): 159–181.

Aripkah, Nur. “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020): 369.

Aryani, Fajar Dian. “Transisi Paradigmatik Korporasi dan Konstruksi Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi Era Globalisasi.” *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021): 207.

Ayuningsih, Irma Reisalinda, and Febby Mutiara Nelson. “Perampasan Aset Tanpa Pidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 252.

Barama, Michael. “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 10–14.

———. *Tindak Pidana Khusus*. Pertama. Manado: Unsrat Press, 2015.

Bayuaji, Rihantoro. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Edited by Nuriyanto Daim A. Surabaya: Laksbang Justisia, 2019. Accessed March 11, 2024. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/380/2/Buku%20Prinsip%20Hukum%20P>

erampasan%20Aset%20Koruptor%20Dalam%20Perspektif%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang%20%281%29.pdf.

- Black, M. A, Henry Campbell. "Black's Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern." *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co, 1968.
- Buamona, Syahdi. "White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Madani Legal Review* 3, no. 1 (2019): 32.
- Candra, Deddy, and Arfin. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Trnasnasional." *Jurnal BPPK* 11, no. 1 (2018): 39–41.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Cintya, Sindhi, Shrishti Shrishti, and Christine Kansil S.T. "Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara." In *Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*, 633. Jakarta: SERINA IV UNTAR 2022, 2022. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10295001_7A230822170033.pdf.
- Conklin, J.E. "Illegal But Not Criminal - Business Crime In America" (1977): 55.
- Damiana Cut Emeria. "Wilmar, Musim Mas, Permata Hijau Tersangka Korupsi Migor!" *CNBC Indonesia*. Last modified 2023. Accessed December 6, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230615182729-4-446330/wilmar-musim-mas-permata-hijau-tersangka-korupsi-migor>.
- Dewi, Arma. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 4.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Dimas Bayu. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022." *DataIndonesia.Id*. Last modified 2023. Accessed November 16, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.
- Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021. https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/5.%20Kajian%20OHukum%20Perampasan%20Aset.pdf.

- Eleanora, Fransiska Novita. "White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat." *Forum Ilmiah* 10, no. 2 (2013): 243.
- Fadilah, Isnaini Nur. "In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (December 1, 2022): 98.
- Fatimah, Fines, and Barda Nawawi Arief. "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 7, no. 2 (2012): 9.
- Fitriyani, Desi, and Muthi'ah Maizaroh. "Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia." *AML/CFT Journal / PPATK* 1, no. 2 (2023): 210.
- Frankel, Tamar, and Tomasz Braun. "Law And Culture." *Boston University Law Review Online* 101, no. 157 (2021): 173.
- Gunadi, Muhammad Yusril, Fathur Rauzi, and Abdul Gani Makrup. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Ditinjau Dari KUHP (Studi Putusan No. 1/PID.B/2022/PN.Mtr)." *Unizar Recht Journal* 2, no. 2 (2023): 241.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 1, no. 6 (2021): 472.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Revisi 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *UBELAJ* vol.4, no. no.1 (April 2019): 37.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dab vicarious liability)*. Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hiariej, Eddy O. S. "Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (October 29, 2020): 340.
- Hiariej, Eddy O.S. "Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi." *Mimbar Hukum* 18, no. 3 (October 2006): 294–295.
- Hidayah, A. Khaerun. "Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)." Skripsi, UIN Alauddin, 2016. Accessed March 11, 2024. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2476/1/A.Khaerun%20Hidayah.pdf>.

- Hikmawati, Puteri. “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 145.
- Huda, Misbahul. “Politik Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Legal Politics of Corporate Crime in Indonesia.” *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 51.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. Accessed May 21, 2024. https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Riset_Penjelasan-Hukum-Perampasan-Aset-Tanpa-Pidana_2.pdf.
- Husodo, Adnan Topan. “Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 2010 (n.d.): 584.
- Hutagalung, Chyntia R. “Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.” *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020): 38.
- Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2017): 326.
- Indriana, Yayan. “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Cepalo* 2, no. 2 (2018): 123–125.
- International Criminal Law Services. *Modes of Liability: Commission & Participation*. European Union: Part of the OSCE-ODIHR/ICTY/UNICRI Project “Supporting the Transfer of Knowledge and Materials of War Crimes Cases from the ICTY to National Jurisdictions” Developed by International Criminal Law Services, 2018. Accessed May 3, 2024. <https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-9-modes-of-liability.pdf>.
- Iqbal, Ahmad. “Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (June 28, 2020): 191.
- Irwan, Tania. “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 4 (2021): 713–714.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Istiqomah, Sofiatul, Abdul Rokhim, and Diyan Isnaeni. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak

- Pidana Korupsi.” *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, no. 2 (2023): 294.
- Iswari, Fauzi. “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia” 1, no. 1 (2022).
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, Mochamad Ramdhan Pratama, Pujiyono Pujiyono, and Elisatris Gultom. “The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001: 2016).” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 2 (2021): 232–254.
- Kementerian Hukum Dan HAM. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, 2010. Accessed May 3, 2024. https://bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pe_mindanaan.pdf.
- Kennial Laia. “Tiga Korporasi Sawit Tersangka, UU Perampasan Aset Kian Mendesak.” *BETAHITA*. Last modified 2023. Accessed December 6, 2023. <https://betahita.id/news/detail/8912/tiga-korporasi-sawit-tersangka-uu-perampasan-aset-kian-mendesak.html?v=1687418933>.
- Khairunas. “Tiga Wujud Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi.” *Artikel Blog*. Pontianak: Publish Humas IAIN Pontianak, September 15, 2015. Accessed March 10, 2024. <https://iainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/>.
- Khussen, Nur Nahar. “Harmonisasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Pancasakti, 2022. Accessed March 11, 2024. <https://repository.upstegal.ac.id/5109/>.
- Kristian. “Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 119.
- Kusumo, Bambang Ali. “Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi Dalam Bidang Perpajakan Di Indonesia.” *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 133–136.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lengkong, Lonna Yohanes. “Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 356.

- Lokadata. *Pengembalian Uang Negara Hasil Penindakan Kasus Korupsi (2014-2018)*, n.d. Accessed December 11, 2023. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pengembalian-uang-negara-hasil-penindakan-kasus-korupsi-2014-2018-1568813557>.
- Loqman, Loebby. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Jakarta: Datacom, 2002.
- Lumbanbatu, Raplan. "Jangan Terlalu Mudah Menyimpulkan Adanya Kerugian Keuangan Negara." Artikel Blog. *Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara untuk Seluruh Masyarakat Melalui Media Elektronik*, December 15, 2014. Accessed March 10, 2024. <https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/0/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ketua Mahkamah Agung RI*. Indonesia, 2016.
- Manthovani, Reda. "Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan oleh Korporasi." *Indonesia Corruption Watch* (2010): 12.
- Manuain, Orpa Ganefo. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." Tesis, Universitas Diponegoro, 2005. Accessed March 10, 2024. <file:///C:/Users/ASUS/Documents/MY%20WORLD/tesis%20pertanggungjawaban%20pidana%20korporasi.pdf>.
- Manuain, Orpa Ganefo. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." Universitas Diponegoro, 2005.
- Manullang, Herlina, and Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edited by Yosua Leo Ezra Roito Simamora. Medan: LPP MUHN Press, 2020.
- Marbun, Andreas N. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cetakan 13, Januari 2017. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mewengkang, Marchelino Christian Nathaniel. "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 10 (December 2017): 54.

- Miladmahesi, Rosita. "Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 22, no. 1 (2020): 19.
- Mubayyinah, Fira. "Urgensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Biaya Penanganan Perkara bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2021): 23.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Azhar, Kornelius Benuf. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* Vol.7, no. No.1 (April 2020): 24.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 278–279.
- Muntahar, Teuku Isra, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah. "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 57.
- Muslim. "Eksekusi Riil (Permasalahan Dan Solusi)," September 2, 2021. Accessed June 13, 2024. <https://pa-manado.go.id/eksekusi-riil-permasalahan-dan-solusi/>.
- Muslim, Fithriadi, and Direktori Hukum PPAATK. *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya*. Cet.1. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK, 2021. Accessed March 11, 2024. https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/5.%20Kajian%200Hukum%20Perampasan%20Aset.pdf.
- Nakamnanu, Manuel Defender. "Praduga Tak Bersalah Dan Praduga Bersalah Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Oleh Kepolisian." *Jurnal Hukum Justisia Et Pax* 39, no. 2 (2023): 436.
- Negara, GP. Aditya Prawira. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi." *Jurnal Magister Hukum Progresif* 10, no. 1 (2019): 44.
- Nugraha, Sigit Prabawa. "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." In *National Conference For Law Studies*, 994, 2020.
- Nugroho, Rizki Dwi. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Nuryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure* 1, no. 2 (2016): 398.

- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 32.
- Panggabean, Mompang L. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013." *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 1, no. 12 (2017): 7.
- Parangan, Stevy Nathaniel Isser, Abdurrahman Konoras, and Wempie Jh. Kumendong. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Cukai." *Lex Privatum* IX, no. 7 (June 2021): 43.
- Prastyo, Brian Amy, and Ronald Tumpal Hutagalung. "Prospek Menetapkan Robot Sebagai Subyek Hukum." *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 1 (2023): 180–181.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Putra, Azharul Nugraha. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (studi kasus putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mks)." Skripsi, Universitas Hasanudin, 2017. Accessed March 10, 2024. <http://bit.ly/2DMvgNB>.
- Putra, Beni. "Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Locus: Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 8 (2023): 752.
- Putra, Faizal Hamzah Yuwono, Karim, and M. A. Razak. "Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013." *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2021): 40.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet.8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, and Purwoto. "Sistem Pidana dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2012): 5.
- Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 1 (February 23, 2018): 1.
- Retnowinarni, Rini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia." *Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2019): 95.

- Reza, Aulia Ali, Supriyadi Widodo Eddyono, and Antyo Rentjoko. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. 1. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 200–202.
- Rohi, Glenn Merciano Eben, I Nyoman Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 227.
- Rukmono, Bambang Sugeng, Pujiyono Suwadi, and Muhammad Saiful Islam. “The Effectiveness of Recovering Losses on State Assets Policy in Dismissing Handling of Corruption.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 299–330.
- Sahlan, Mohammad. “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 23 (2016): 277.
- Saputra, Noverdi Puja. “Politik Hukum Dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset.” *Jurnal Info Singkat* 15, no. 10 (2023): 2.
- Saputra, Refky. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia.” *Jurnal Integritas* 3, no. 1 (2017): 127–128.
- Sari, Retno Dewi Pulung, I Nyoman Nurjaya, Dhiana Puspitawati, and Sequito Monteiro. “State Financial Losses as a Result of Environmental Damage.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 1 (February 15, 2024): 121–148.
- Satria, Hariman. “Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Integritas* 4, no. 2 (2018): 35.
- Setiadi, Wicipto. “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi).” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.15, no. 3 (November 2018): 249–262.
- Sitohang, Hisar, Martono Anggusti, and Uton Utomo. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif.” *PATIK : Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2018): 79.
- Sobko, Ganna, Natalia Chenshova, Maksym Viunyk, Tetiana Duiunova, and Evgenia Palii. “Characteristics of Punishment for Property Embezzlement and Appropriation by Military Personnel through Abuse of Office.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 157–180.

- Sriwidodo, Joko. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2022. Accessed March 25, 2024. <http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban%20Kejahatan%20Korporasi%20Revisi.pdf>.
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Hartiwiningsih IV*, no. 1 (2017): 113.
- Suhariyanto, Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 448.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018.
- Suhatrizar. *Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Universitas Medan Area, n.d.
- Sukarno. "Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara." *INDONESIAN TREASURY REVIEW Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 3, no. 4 (2018): 307.
- Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and Supanto. "Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7, no. 1 (2019): 116.
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta Selatan: UAI Press, 2015. Accessed May 1, 2024. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/TRANSFORMASI-BADAN-HUKUM-DI-INDONESIA_April-2015_SA.pdf.
- Syndo, Sivana Amanda Diamita. "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 111.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 201AD.
- Tulung, Dedy Lontoh, Johnny Lembong, and Ronny A. Maramis,. "Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materil Tentang Perbuatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016.” *Lex Et Societatis* IV, no. 1 (2018): 79.

Utama, Andrew Shandy, Hasnati, Sandra Dewi, Rizana, Ade Pratiwi Susanty, and Olivia Anggie Johar. *Problematika Penegakan Hukum*. Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021. Accessed May 5, 2024. <https://repository.unilak.ac.id/2336/2/PROBLEMATIKA%20PENEGAKAN%20HUKUM.pdf>.

Utama, Muhammad Fuat Widyaaiswara. “Penelusuran Aset (Asset Tracing) dan Pemulihan Kerugian Negara (Loss Recovery).” *Berita*, Pebruari 2014. Accessed May 1, 2024. <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1028>.

Wibowo, Ari. “Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan).” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (June 2020): 127.

Wibowo, Fajar Gigih. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (June 30, 2021): 3.

Widyaningrum, Hesti. “Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi.” *Jurnal Volksgeist* 1, no. 2 (2018): 147.

Yudha, Fajar Tri. “Mekanisme Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023. Accessed May 3, 2024. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21790/SKRIPSI%20FAJAR%20TRIYUDHA%20%281606200111%29%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Yulia, Rena. “Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?” *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 174.

Yustrisia, Lola. “Mekanisme Pengembalian Aset Di Negara Wilayah Asia Tenggara.” *Sumbang 12 Journal* 1, no. 1 (2022): 32.

“Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022. Accessed May 2, 2024. <file:///C:/Users/ASUS/Documents/MY%20WORLD/PERATURAN/NA%20RUU%20Perampasan%20Aset%20Terkait%20dengan%20tindak%20Pidana%20fix2.pdf>.

Pasal 1 Angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, n.d.

Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Vol. 24, 1960. Accessed March 10, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53496/perpu-no-24-tahun-1960>.

“U4 Brief 2:2007 The Recovery of Stolen Assets” (n.d.).

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara. Vol. 5, 2004.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023, 2023.

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 2004.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009.

UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vol. 140, 1999.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A